

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGEMBANGAN PEMANFAATAN PERAIRAN UMUM, LAHAN PERTANIAN DAN KAWASAN WADUK CIRATA

IMPLEMENTATION OF POLICIES REGARDING THE DEVELOPMENT OF UTILIZATION OF PUBLIC WATER, AGRICULTURAL LAND AND CIRATA RESERVOIR AREA

Meiwan Setia Pratama¹, Nia Pusparini²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh “Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk Cirata”.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut; Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk Cirata serta bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk Cirata.

Dalam Penelitian ini peneliti menguji hipotesis berdasarkan proses dan cara-cara pengendalian yang di kemukakan oleh George C. Edwards III ada empat variabel yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan publik yaitu: Komunikasi (*communications*), Sumber daya (*resources*), sikap (*disposition* atau *attituden*) dan stukturbirokrasi (*bureucratic structure*) (1980:10-12).

Berdasarkan teori-teori dalam kerangka penelitian, dapat merumuskan proposisi ” Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk Cirata” dapat berjalan optimal melalui komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sumber dan teknik pengumpulan data adalah sumber data primer dan data sekunder, sedangkan pengumpulan data adalah melalui studi keperpustakaan dan studi lapangan yaitu melalui observasi, wawancara kepada informan dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa dalam implementasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Waduk Cirata sudah sesuai dengan prosedur kerjanya dalam mengimplementasikan kebijakan kepada pateani keramba jaring apung dan telah diatur oleh kebijakan SK Gubernur No. 41 Tahun 2002 Tentang Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk Cirata.i

Kata kunci: Implementasi Kebijakan Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum

ABSTRACT

This research is based on "Policy Implementation on Development of Public Water Utilization, Agricultural Land and Cirata Reservoir Area".

Based on the background of the research, researchers formulate the following issues; Implementation of Policy on Development of Public Water Utilization, Agricultural Land and Cirata Reservoir Area as well as how the constraining factors and supporting factors in Policy Implementation About Development of Public Water Utilization, Agricultural Land and Cirata Reservoir Area.

In this study, the researchers tested the hypotheses based on the process and the methods of control proposed by George C. Edwards III. There are four influential variables in the implementation of public policy: Communication, and bureaucratic structure (1980: 10-12).

Based on the theories in the research framework, it can formulate the proposition of "Policy Implementation on Development of Public Water Utilization, Agricultural Land and Cirata Reservoir Area" can be run optimally through communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

The research method used is qualitative research method. Sources and data collection techniques are primary and secondary data sources, while data collection is through the study of libraries and field studies through observation, interviews to informants and documentation.

Based on the result of research, show that in the implementation conducted by the Cirata Reservoir Management Board is in accordance with the working procedure in implementing the policy to pateani keramba floating net and has been regulated by the policy of Governor Decree no. 41 of 2002 on the Development of Public Water Utilization, Agricultural Land and Cirata Reservoir Area.

Keywords: *Implementation of Public Water Utilization Development Policy*

1. PENDAHULUAN

Waduk adalah kolam besar tempat menyimpan air sediaan berbagai kebutuhan. Waduk buatan dibangun dengan cara membuat bendungan yang lalu dialiri air sampai waduk penuh. SK Direksi PT Pembangkit Jawa Bali No. 023.K/020/DIR/2014 tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Pengelola Waduk Cirata disebutkan bahwa, Untuk melaksanakan kegiatan budidaya ikan menggunakan kontruksi Keramba Jaring Apung pengelolaan diserahkan kepada Badan Pengelola Waduk Cirata memiliki Tugas Pokok antara lain Memanfaatkan dan mengembangkan kekuatan sumber daya yang ada untuk kelestarian waduk dan bendungan serta lingkungan sekitar Waduk Cirata, Melaksanakan kegiatan

yang bersifat teknis serta terukur terkait dengan kelestarian kualitas dan kuantitas serta laju sedimentasi di Waduk Cirata, Mengelola pemeliharaan lingkungan waduk dan bendungan meliputi pekerjaan membersihkan perairan terhadap sampah dan endapan material, budidaya kolam jaring apung, pemanfaatan lahan, penghijauan serta kualitas air dan Fungsi sebagai berikut;

Secara administratif waduk Cirata terletak di wilayah tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat. Lokasi bendungan terletak di Kabupaten Bandung Barat dan Purwakarta, area genangan terletak di Kabupaten Cianjur, Purwakarta, dan Bandung Barat, sedangkan pusat listrik terletak di Kabupaten Purwakarta. Dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2002 pasal 9 dijelaskan bahwa lokasi yang

dijinkan untuk kegiatan usaha budidaya ikan ditetapkan pada elevasi 205 M sesuai dengan zonasi, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Lokasi Yang Diizinkan Untuk Kegiatan Usaha Budidaya Ikan di Waduk Cirata

Zona	Lokasi	Jumlah KJA
Zona I	Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat	1896 petak
Zona II	Kecamatan Ciranjang, Mande, Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur	5460 petak
Zona III	Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta	4644 petak

Sumber : Badan Pengelola Waduk Cirata, 2017

Namun banyak beberapa permasalahan yang di timbulkan dengan adanya Keramba Jaring Apung di Waduk Cirata salah satunya adalah Perkembangan populasi keramba jaring apung tidak terkendali dan sudah melampaui batas yang diijinkan yaitu +- 12000 unit dan sekarang diperkirakan sudah mencapai diatas 77.000 unit. Tidak terkendalinya jumlah keramba jaring apung menyebabkan masalah lain yaitu adanya sidementasi atau pendangkalan waduk cirata.

Untuk terciptanya kelestarian Waduk, pemanfaatan perairan umum, maka dengan itu Pemerintah ataupun Badan yang mengelola Waduk Cirata selayaknya berperan aktif dalam dampak yang ditimbulkan pemanfaatan perairan umum yang belum optimal, dan bila proses itu dibiarkan berlangsung cukup lebih lama lagi akan menimbulkan dampak yang lebih besar. Dimana dalam pemanfaatan perairan umum kawasan Waduk Cirata sebagai lahan perekonomian bagi pemerintah ataupun

masyarakat setempat tentunya terdapat hal-hal yang dapat mendukung pemanfaatan fungsi perairan umum yang berada di kawasan waduk maupun hal-hal yang dapat mengganggu fungsi utama waduk, oleh karna itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui zona mana yang dapat digunakan dalam pemanfaatan perairan umum kawasan waduk cirata.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:146) mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai :“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan keputusan kebijakan sebelumnya”.⁴

Sedangkan Mazmanian dan Sabatier dalam Agustiono, (2006:153-154) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

⁴ Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Yogyakarta: BPFE. Hal 146

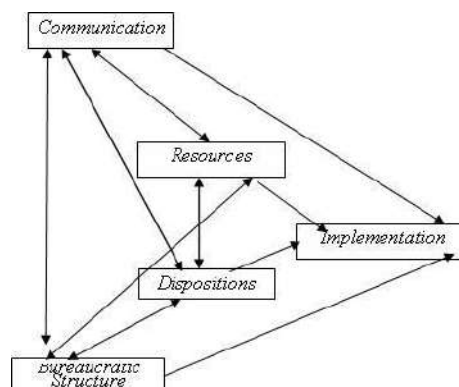
“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.⁵

Dari definisi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut (minimal) tiga hal, yaitu ; (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan. (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan (3) adanya hasil kegiatan. Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.2 Dimensi Dimensi Implementasi Kebijakan

Berkaitan dengan keberhasilan implementasi kebijakan George C. Edward III mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yakni : *Communication*; *resources*; *disposition or attitude*; dan *bureaucratic structure*.⁶ Lebih lanjut dikemukakan Edwards III (1980:147-148)

keempat faktor tersebut masing-masing saling mempengaruhi satu sama lain, juga secara langsung mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Pada gambar berikut menjelaskan interaksi antar keempat faktor sebagaimana dimaksudkan Edaward III tersebut.



Gambar 2.3
Dampak Langsung dan Tidak Langsung Pada implementasi

Sumber: Winarno.2005:208

Dimensi dimensi implementasi kebijakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) *Communications* (Komunikasi);

Komunikasi merupakan persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan secara efektif. Para pelaksana kebijakan selayaknya mengetahui secara tepat apa yang akan mereka kerjakan. Untuk itu, ada tiga hal penting yang berkaitan dengan komunikasi efektif yakni; transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*). Tidak sempurnanya aspek komunikasi akan menyebabkan para pelaksana kebijakan tidak mengetahui apa yang harus disampaikan secara jelas, akurat dan konsisten. Selain itu, tidak

⁵ Agustiono, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: UNPAD, AIPI dan Puslit KP2W. Hal 153-154

⁶ Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washinton DC : Congressional Quarterly, Inc. Page 147-148

sempurnanya komunikasi akan mengakibatkan para pelaksana kebijakan menafsirkan kebijakan sesuai dengan persepsinya sendiri. Hal lainnya menyangkut dengan konsistensi. Keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi para pelaksana serta menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.

b) Resources (Sumberdaya)

Sumberdaya merupakan faktor kedua yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Kurangnya sumberdaya akan berakibat ketidakefektifan penerapan kebijakan. Sumber sumber yang penting meliputi:

- Staf yang memadai serta keahlian keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas mereka;
- Wewenang dan fasilitas - fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan pelayanan publik.

c) Disposition (Sikap Pelaksana)

Disposition atau sikap pelaksana merupakan faktor ketiga yang memiliki konsekuensi penting bagi efektivitas implementasi kebijakan. Disposisi diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan.

Disposition akan menjelaskan kecenderungan pelaksana untuk bertindak, dimana kecenderungan untuk bertindak ini dibentuk oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi yang ada dalam persepsi pelaksana yang selanjutnya akan membentuk sikap mendukung atau menolak kebijakan yang akan diimplementasikan.

d) Bureaucratic Structures (Struktur birokrasi)

Merupakan dimensi terakhir yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan itu tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi tersebut. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian di dapatkan melalui dua sumber data yaitu : Data primer dan Data sekunder Teknik Pengumpulan Data menggunakan Teknik triangulasi ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu : Observasi Partisipan, Wawancara Mendalam dan Dokumentasi . Teknik Analisis Data melalui Reduksi Data, Sajian data, Penarikan kesimpulan dan verifikasi dan Pengambilan kesimpulan

4. PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian Dan Kawasan Waduk Cirata

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi sebagaimana dikemukakan Edward III (2002:1750) merupakan persyaratan pertama bagi terlaksananya implementasi kebijakan yang efektif. Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan pemanfaatan perairan umum, lahan pertanian dan kawasan waduk cirata oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat yaitu

mengadakan rapat-rapat pertemuan dengan intensi-intensi untuk membuat SK. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat di perintahkan oleh Gubernur untuk membatasi jumlah Keramba Jaring Apung yang ada di Perairan Umum Waduk Cirata yang sudah overload, di kebijakan SK Gubernur No. 41 Tahun 2002 boleh diperuntukan budidaya ikan dengan konstruksi Keramba Jaring Apung tetapi hanya di perbolehkan 12.000 unit.

Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan tentang Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian dan kawasan Waduk Cirata oleh Kepala Badan Pengelola Waduk Cirata dalam mengimplementasikan Kebijakan Tentang Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk Cirata komunikasinya lebih mengutamakan dengan mengundang pihak-pihak yang terkait untuk menyampaikan dan mensosialisasikan tentang apa yang tidak boleh dilakukan di perairan umum sesuai dengan kebijakan SK Gubernur No 41 Tahun 2002 sifatnya yaitu periodik rutin setiap satu minggu sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan, maka penulis simpulkan bahwa telah ada komunikasi antara pengelola waduk dan masyarakat petani keramba jaring apung. Akan tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat petani Keramba Jaring Apung (KJA) yang tidak mengetahui tentang kebijakan Pengembangan Pemanfaatan, Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk Cirata.

2. Sumber-Sumber atau Sumber Daya (Resources)

Pada konteks sumberdaya manusia, berdasarkan temuan dalam penelitian diketahui bahwa sumberdaya manusia merupakan salah satu hambatan bagi pelaksanaan kebijakan yang berimplikasi pada kinerja yang dihasilkan oleh Badan Pengelola Waduk Cirata. Rekrutmen sumberdaya manusia, sebagai upaya untuk mendukung kinerja optimal seringkali dihadapkan pada kepentingan-kepentingan berbagai pihak, sehingga kurang memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan.

Terpenuhinya aspek sumberdaya manusia dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan pemanfaatan perairan umum, lahan pertanian dan kawasan waduk cirata Sumberdaya dan sarana prasarana sudah memadai dan sudah sesuai dengan SK Gubernur No. 41 Tahun 2002. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa mengadakan suatu tindakan-tindakan mengenai populasi Keramba Jaring Apung (KJA) yang setiap tahunnya meningkat Dinas Perikanan bekerjasama dengan Badan Pengelola Waduk Cirata dan intensi-intensi yang terkait untuk menertibkan Keramba Jaring Apung (KJA) yang sudah tidak layak pakai dan yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Dinas Perikanan bekerjasama dengan Badan Pengelola Waduk Cirata dan intensi lainnya untuk mengurangi populasi Keramba Jaring Apung (KJA) sampah Keramba Jaring Apung (KJA) yang sudah ditinggalkan pemiliknya dan juga untuk menciptakan kelestarian Waduk Cirata agar tetap lestari.

Dari hasil wawancara dengan salah satu informan masyarakat petani Keramba Jaring Apung (KJA)

mengatakan bahwa, Sumber daya yang ada di Waduk Cirata sangat dirasakan oleh masyarakat petani Keramba Jaring Apung (KJA) disini, oleh sebab itu kepala dinas perikanan sangat cepat tanggap dalam penerapan kebijakan pengembangan pemanfaatan, lahan pertanian dan kawasan waduk cirata''

Berdasarkan wawancara di atas, maka penulis dapat simpulkan bahwa sumber daya sarana prasarana yang mendukung jalannya penerapan pengembangan pemanfaatan, lahan pertanian dan kawasan waduk cirata sudah termasuk cukup. Walaupun sumberdaya sarana prasarana tetapi masih ada penambahan bantuan yang sehingga tercukupi untuk menerapkan kebijakan.

3. **Kecenderungan-Kecenderungan atau Sikap Pelaksana (*Disposition*)**

Berdasarkan temuan penelitian mengindikasikan bahwa disposisi sangat menentukan terhadap perwujudan kinerja yang optimal dari penerapan kebijakan. Kesulitan untuk memberikan insentif material yang memadai merupakan fenomena sikap pelaksana yang dijumpai di lapangan. Menurut Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat sikap pelaksana dari pemerintah sendiri sudah lebih baik dengan adanya bantuan dan kerja sama dengan pihak lainnya untuk mengurangi populasi Keramba Jaring Apung (KJA) yang ada di Waduk Cirata yang over populasi dengan adanya SK Gubernur No. 41 Tahun 2002 tetapi belum ada kesepakatan bersama untuk mengurangi jumlah Keramba Jaring Apung (KJA)

Sedangkan menurut salah satu informan masyarakat petani keramba jaring apung mengenai sikap pemerintah: dalam proses penerapan

kebijakan sosialisai yang diberikan oleh pemerintah sudah sangat baik dengan adanya sosialisasi dalam bentuk surat dan baliho-baliho tentang kebijakan Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk Cirata kepada masyarakat petani Keramba Jaring Apung (KJA)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sikap pelaksana dalam bekerja sudah cukup baik dengan adanya sosialisasi terjun langsung kelapangan dan membuat baliho tentang kebijakan, tetapi masih ada juga kelalaian dalam memberikan informasi tentang pengembangan pemanfaatan perairan umum, lahan pertanian dan kawasan waduk cirata kepada masyarakat keramba jaring apung belum menyeluruh sehingga masyarakat yang ajuh dari daratan tidak tahu informasi secara langsung tentang kebijakan pengembangan pemanfaatan perairan umum, lahan pertanian dan kawasan waduk cirata.

4 **Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)**

Struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugas. Dari hasil inform Kepala Badanasi yang di dapat dari Pengelola Waduk Cirata mengatakan bahwa dalam rangka mengelola Waduk Cirata Badan Pengelola memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pengelolaan secara profesional (mengelola, memelihara dan mengembangkan potensi ekonomi), asset berupa lahan-lahan disekitarnya yang terletak di Waduk Cirata tanpa mengabaikan kepentingan

Unit Pembangkitan dan masyarakat yang mempergunakan sungai dan waduk tersebut.

Berbagai jenis kegiatan dilakukan untuk menjalankan tugas pokok tersebut, meliputi pemantauan dan pembersihan perairan dari gulma air dan sampah serta pemeliharaan trashboom sebagai sekat sampah disetiap Sub Das Cirata, pemantauan kualitas air dan sedimentasi serta berbagai penelitian tentang lingkungan Waduk Cirata, kegiatan penghijauan dan reboisasi di wilayah *greenbelt* dan *catchment area* Waduk Cirata, penyuluhan masalah ketertiban, kelestarian lingkungan, dan kegiatan masyarakat di waduk dan sekitarnya, pemeliharaan asset lahan dengan perapatan patok batas tanah milik PLN, batas perairan, dan pemasangan rambu-rambu peringatan”.

Selain itu hasil dari wawancara dengan salah satu informan yaitu masyarakat mengenai struktur birokrasi, beliau mengatakan :bahwa, pegawai Badan Pengelola Waduk Cirata bertanggung jawab dalam menerapkan kegiatan pemanfaatan perairan umum, dan penyelesaian keluhan, serta persoalan internal agar dapat berjalan dengan lebih cepat, tepat, dan efektif”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat memahami bahwa semua pelaksanaan dalam stuktur birokrasi Badan Pengelola Waduk Cirata sudah melaksanakan apa yang menjadi tugasnya sesuai dengan job descriptionnya yang mereka terima demi terlaksananya tujuan dari badan tersebut, namun dalam implementasi kebijakannya terdapat faktor pendukung yang juga masih terdapat faktor hambatan dalam peroses implementasi kebijakan tersebut,

dan untuk lebih jelasnya mengenai kedua faktor tersebut penulismemaparkan mengenai kedua faktor tersebut sebagai berikut.

5. Simpulan

- a. Komunikasi merupakan persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan secara efektif. Para pelaksana kebijakan selayaknya mengetahui secara tepat apa yang akan mereka kerjakan. Proses Komunikasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Waduk Cirata sudah cukup baik yaitu dengan mengadakan Sosialisai, himbauan-himbauan dan rapat-rapat dengan Dinas-dinas dan intansi yang terkait untuk melakukan penerapan kebijakan cara penyampaiannya yaitu secara langsung dan tidak langsung, untuk penyampaiannya dengan cara sosialisasi sifatnya periodik itu rutin satu minggu sekali menyampaikan tentang kebijakan SK Gubernur No. 41 Tahun 2002 Tentang Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk Cirata yaitu mengsosialisasikan kegiatan apasaja yang boleh dan tidak boleh dilakukan diperairan umum waduk cirata, tetapi cara penyampaian Badan Pengelola kepada petani keramba jaring apung belum cukup optimal, karena para petani keramba jaring apung kurang menanggapi sosialisasi dari Badan Pengelola tentang Kebijakan Tentang

Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk Cirata.

- b. Sumberdaya dalam implementasi kebijakan menduduki posisi yang tidak kalah pentingnya. Ketiadaan sumberdaya atau kurang optimalnya potensi sumberdaya akan berakibat ketidakefektifan penerapan kebijakan. Sumber sumber yang penting meliputi sumberdaya manusia yang memadai serta keahlian keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dan Wewenang serta fasilitas - fasilitas yang diperlukan. Badan Pengelola sudah sangat optimal dalam bidang sumberdaya misalkan dalam sumberdaya manusia sudah memadai dan melaksanakan tugas dengan baik. Fasilitas yang dimiliki oleh Badan Pengelola untuk melaksanakan penerapan kebijakan sudah memadai dan adanya anggaran yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Waduk Cirata dalam melaksanakan penerapan kebijakan contohnya untuk penarikan KJA yang sudah rusak dan menjadi sampah, penarikan KJA yang sudah ditinggal pemiliknya.
- c. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor ketiga yang memiliki konsekuensi penting bagi efektivitas implementasi kebijakan. Disposisi diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Sikap dari Badan

Pengelola Waduk Cirata sudah cukup baik dalam melaksanakan penerapan kebijakan sudah tersampaikan kepada para pelaksana kegiatan budidaya ikan tetapi sikap para pelaksana yaitu dari petani KJA masih kurang peduli kepada kebijakan yang ada mereka masih belum tergugah untuk taat pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi mengenai SK Gubernur No. 41 Tahun 2002 Tentang Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk Cirata para pengusaha atau para petani KJA mementingkan hasil tetapi tidak mementingkan apa dampak yang ditimbulkan, misalkan dengan semakin banyaknya KJA yang terdapat di waduk cirata sudah over populasi dan berdampak kepada lingkungan waduk, kualitas air waduk dan banyak dampak lainnya.

- d. Struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugas. Dalam rangka mengelola Waduk Cirata BPWC memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pengelolaan secara profesional (mengelola, memelihara dan mengembangkan potensi ekonomi), asset berupa lahan-lahan disekitarnya yang terletak di waduk Cirata tanpa mengabaikan kepentingan Unit

Pembangkitan dan masyarakat yang mempergunakan sungai dan waduk tersebut.

Berbagai jenis kegiatan dilakukan untuk menjalankan tugas pokok tersebut, meliputi pemantauan dan pembersihan perairan dari gulma air dan sampah serta pemeliharaan trashboom sebagai sekat sampah disetiap Sub Das Cirata, pemantauan kualitas air dan sedimentasi serta berbagai penelitian tentang lingkungan waduk Cirata, kegiatan penghijauan dan reboisasi di wilayah *greenbelt* dan *catchment area* waduk Cirata, penyuluhan masalah ketertiban, kelestarian lingkungan, dan kegiatan masyarakat di waduk dan sekitarnya, pemeliharaan asset lahan dengan perapatan patok batas tanah milik PLN, batas perairan, dan pemasangan rambu-rambu peringatan. Pegawai BPWC bertanggung jawab dalam menerapkan kegiatan pemanfaatan perairan umum, dan penyelesaian keluhan, serta persoalan internal agar dapat berjalan dengan lebih cepat, tepat, dan efektif.

Ketika kegiatan pemanfaatan perairan umum mengenai semakin meningkatnya Keramba Jaring Apung yang melebihi kapasitas yang sudah ditentukan dalam kebijakan, maka banyak masyarakat yang komplain menganggap kinerja BPWC lamban, tetapi pegawai BPWC memberi perhatian lebih dengan menjelaskan apa penyebab dari semakin meningkatnya populasi KJA yang ada di Waduk Cirata tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Agustiono, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: UNPAD, AIPI dan Puslit KP2W.
- Anderson. James.E. 1978. *Public Policy Making*. New York: Holt Rinehart and Winston.
- Broomley. Daniel W. 1989. *Economic Interest and Institutions: The Conceptual Foundations of Public Policy*. New York Basic Blackwell.
- Craswell, John W. 2002. *Desain Penelitian*. Jakarta: KIK
- Perss.Dunn, William.N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Penerjemah : Muhajir Darwin).Yogyakarta,Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R., 1987. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, N.J. Prentice. Edwards III,George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washinton DC : Congressional Quarter;y, Inc.
- Hoogerwerf. 1983. *Over heids beleid, ilmu pemerintahan* (terjemahan oleh : R.L.L. Tobing). Jakarta : Erlangga.
- Islamy, M.Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara.
- Jones ,Charles O. 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*, Third Edition. Monterey, California: Cole Publishing Company.
- Katili, J.A. (1983). *Sumber Daya Alam Untuk Pembangunan Nasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: LembagaAdministrasi Negara & Duta Pertiwi Foundation.
- Moh., Nazir, 1999, *Metode Penelitian*, Cetak Ketiga, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Siagian P, Sondang. (1983). *Organisasi Kepemimpinan dan Prilaku*

- Organisasi*. Jakarta : Gunung Agung.
- Supangat, Agus. (2007). *Konservasi Sumber Daya Perairan Edisi Satu*. Bandung. Universitas Terbuka.
- S. Nasution 2002. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perespektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendikia
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surysningrat, Bayu. 1998. *Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia*. Jakarta. : Bina Angkasa
- Surakhmad, Winarno. (2004). *Pengantar Pengertian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito
- Tachyan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: API dan Puslit KP2W.
- Wahab, Solihin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Jogjakarta: BPFE.

B. Dokumen-dokumen dan Sumber Lainnya:

- Indonesia Republik, Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan.
- Propinsi Jawa Barat. 2002. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 41 Tahun 2002 Tentang *Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk Cirata*.
- _____.2014. Company Profile Badan Pengelola Waduk Cirata . Bandung: Badan Pengelola Waduk Cirata.